

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Penggunaan Laporan Keuangan Daerah

Penggunaan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002). Berdasarkan Deniski (1973) yang dikutip dalam Sujana (2002), yang dikenal dengan *Impossibility Theory* bahwa banyak jenis pengguna informasi untuk laporan keuangan dan pengguna ini mempunyai bermacam kepentingan, oleh karena itu sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua jenis pengguna.

Untuk memuaskan pengguna informasi, sangat perlu dilakukan upaya untuk menggali apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2006:21) bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara rinci tujuannya yaitu:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan organisasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. Namun kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah dapat diringkas sebagai berikut (Mardiasmo, 2006:25)

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan penggunaan yang diberikan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, dan mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan Negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

Penggunaan informasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah seberapa besar kebutuhan informasi dari pihak-pihak di luar manajemen internal pemda terpengaruh oleh penyajian laporan keuangan daerah itu dan atas keterbukaan akses yang diberikan.

Pemberlakuan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke daerah kemudian menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai prasyarat perwujudan *good governance* (Ulum, 2004:14).

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu :

- (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat,
- (2) memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan
- (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah:

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2006:68) pengertian transparansi adalah :

Keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan pryeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu.

Kaitannya dengan transparansi, masyarakat (publik) mempunyai hak terhadap pemerintah yaitu (Mardiasmo, 2006:72):

1. Hak untuk mengetahui (*right to know*), yaitu:
  - a. Mengetahui kebijakan pemerintah.
  - b. Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah.
  - c. Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.
2. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
3. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Menurut PP 71 tahun 2010 pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat
- b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah

Menurut Misra dalam Arnel (2010), informasi akuntansi pemerintah digunakan oleh :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Legislatif )  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah untuk mengelola keuangan daerah.
- b. Badan Pengawas  
Badan Pengawas adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
- c. Investor, Kreditor Dan Donatur  
Pihak eksternal yang termasuk dalam investor, kreditor dan donatur meliputi badan atau organisasi, seperti pemerintah, lembaga keuangan, maupun lembaga lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan pemerintah daerah.
- d. Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah  
Pihak eksternal yang termasuk dalam kategori analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah merupakan pihak-pihak seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, konsultan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lainnya, yang menaruh perhatian atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah .
- e. Rakyat  
Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah daerah, khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk atau jasa pemerintah daerah.
- f. Pemerintah Pusat  
Pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sangat kuat dengan pemerintah daerah karena tentunya memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur/ bupati/ walikota sebagai wakil pemerintah di daerah.
- g. Pemerintah Daerah ( Provinsi, Kabupaten, Kota )  
Pemerintah daerah dengan daerah lain saling berhubungan dan memiliki kepentingan dalam hal ekonomi, misalnya dalam rangka melakukan pinjaman.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintah paragraf 16 menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah , namun tidak terbatas pada :

- a) Masyarakat
- b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemerintah

- c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.
- d) Pemerintah.

## 2. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

### a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, skedul dan informasi tambahan lainnya yang berkaitan dengan laporan tersebut (IAI, 2002). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Abdul Halim, 2007).

Didalam otonomi daerah bukan hanya terdapat hal-hal berupa pelimpahan dan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah saja, akan tetapi yang lebih utama adalah adanya keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayan kepada masyarakat.

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Menurut Harahap (2007; 12) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah ke dalam konteks yang memberikan makna.

#### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan (Mardiasmo, 2006; 32):

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai (Mardiasmo, 2006; 33):

- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal (Halim, 2006; 13):

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas dana;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat



dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

### **c. Fungsi Laporan Keuangan Daerah**

Adapun fungsi dari laporan keuangan itu sendiri pada dasarnya adalah sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sebagai hasil dari proses akuntansi (Nordiawan,2006).

Fungsi laporan keuangan adalah sebagai berikut (mardiasmo,2002:34)

- a. Laporan keuangan digunakan untuk memberi jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan ,laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
- b. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajmen pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis.
- c. Laporan keuangan berfungsi untuk memeberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana.
- d. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu penggunaan dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kinerja dapat melanjutkan pelayanan dimasa yang akan datang.
- e. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi oleh karyawan dan masyarakat.

### **d. Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan. Adapun tujuan dari laporan realisasi anggaran terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Tujuan standar laporean realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang ralingisasi dan anggaran entitas pelaporan serta tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan paraturan perundang-undangan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Manfaat informasi keuangan yang terkandung didalam neraca adalah (Diamond, 2002 dalam Mulyana, 2006):

1. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggungjawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
2. Meningkatkan transparansi dari aktifitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan untung, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban
4. Memberi informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

#### c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasioanal, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang

mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan informasi lain yang diharuskan dan di anjurkan untuk mengungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) atau sumber dana yang digunakan untuk menutup sisa kurang anggaran tahun lalu (SILKA), sehingga tersaji sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komperatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Saldo anggaran lebih

f. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan–LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, bila ada
- d. Pos luar biasa, bila ada
- e. Surplus / defisit–LO

g. Laporan Perubahan Ekuitas

Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 maka menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;
- b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;
- c) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a) Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta perubahannya selama periode berjalan.
- b) Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas pada awal dan akhir periode mengungkapkan masing-masing perubahannya secara terpisah.

### **3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Hevesi (2005) pengertian dari kompetensi adalah sebagai berikut :

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Catano (1998) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004) menjelaskan pengertian kompetensi sumber daya manusia dari berbagai sumber. Beberapa diantaranya adalah:

1. Kompetensi adalah kombinasi dari motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari pengetahuan yang relevan. Dengan kata lain, kompetensi adalah setiap karakteristik individu yang mungkin terkait dengan kesuksesan kinerja.
2. Pola karakteristik dan terukur pengetahuan, keterampilan, perilaku, keyakinan, nilai-nilai, sifat dan motif yang mendasari, dan kemampuan kerja yang cepat dalam mengaplikasikan pekerjaan.
3. Keterampilan dan sifat-sifat yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menjadi efektif dalam pekerjaan.
4. Keterampilan, pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang diperlukan untuk terlaksananya tugas pekerjaan.
5. Perilaku yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dasar dan untuk meningkatkan prestasi kerja lebih tinggi.
6. Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu yang kausal berkaitan dengan kinerja yang efektif dan/atau superior kriteria direferensikan dalam pekerjaan atau situasi.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam pengertian kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu. Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik dasar lainnya dari individu.
- b. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku. Kompetensi tampil dalam bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dan diukur (*measurable*). Jika potensi yang belum ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dapat observasi/diukur tidak dapat dikategorikan sebagai kompetensi.
- c. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata. Kompetensi bukan sekedar aspek-aspek yang menjadi prasyarat suatu jabatan, tetapi merupakan aspek-aspek yang menentukan optimalitas keberhasilan kinerja. Hanya karakteristik-karakteristik yang mendasari kinerja yang berhasil/efektif yang dapat dikategorikan sebagai kompetensi. Demikian karakteristik yang mendasari kinerja yang tidak efektif juga tidak dapat dikategorikan ke dalam kompetensi.

Oleh karena itu tidak semua aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja itu merupakan kompetensi. Kompetensi hanya merupakan aspek-aspek pribadi (sikap, keterampilan, motif, dan karakteristik lainnya) yang dapat diukur dan esensial untuk pencapaian kinerja yang berhasil. Kompetensi menghasilkan perilaku-perilaku kritical dalam pekerjaan yang membedakan mereka yang menampilkan kinerja yang superior dan yang tidak.



Menurut Boulter, Dalziel dan Hill (2005) kompetensi adalah :

Karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya.

Berdasarkan uraian di atas makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Analisis kompetensi disusun sebagian besar untuk pengembangan karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan.

Menurut Boulter et.al (2005) level kompetensi adalah sebagai berikut :

1. *Skill* adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas dengan baik, misalnya seorang progamer computer.
2. *Knowledge* adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang khusus (tertentu), misalnya bahasa komputer.
3. *Social role* adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang dan ditonjolkan dalam masyarakat (ekspresi nilai-nilai diri), misalnya : pemimpin.
4. *Self image* adalah pandangan orang terhadap diri sendiri, mereflesikan identitas, contoh : melihat diri sendiri sebagai seorang ahli.
5. *Trait* adalah karakteristik abadi dari seorang karakteristik yang membuat orang untuk berperilaku, misalnya : percaya diri sendiri.
6. *Motive* adalah sesuatu dorongan seseorang secara konsisten berperilaku, sebab perilaku seperti hal tersebut sebagai sumber kenyamanan, contoh: prestasi mengemudi.

Kompetensi *Skill* dan *Knowledge* cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. *Social role* dan *self image* cenderung sedikit visibel dan dapat dikontrol perilaku dari luar.

Sedangkan *trait* dan *motive* letaknya lebih dalam pada titik sentral kepribadian. Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah untuk dikembangkan, misalnya dengan program pelatihan untuk meningkatkan tingkat kemampuan SDM. Sedangkan kompetensi *motive* dan *trait* berada pada kepribadian seseorang, sehingga cukup sulit dinilai dan dikembangkan. Salah satu cara yang paling efektif adalah memilih karakteristik tersebut dalam proses seleksi. Adapun konsep diri dan *social role* terletak diantara keduanya dan dapat diubah melalui pelatihan, psikoterapi sekalipun memerlukan waktu yang lebih lama dan sulit.

Menurut Spencer and Spencer (2004 : 5) terdapat 5 (lima) jenis kompetensi, yaitu :

1. *Knowledge*, yaitu ilmu yang dimiliki individu dalam bidang pekerjaan atau area tertentu;
2. *Skill*, yaitu kemampuan untuk kinerja fisik ataupun mental;
3. *Self Concept*, yaitu sikap individu, nilai-nilai yang dianut serta citra diri;
4. *Traits*, yaitu karakteristik fisik dan respon yang konsisten atas situasi atau informasi tertentu.
5. *Motives*, yaitu pemikiran atau niat dasar yang konstan dan mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku tertentu

Selain itu, kompetensi dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. *Threshold Competencies*, yaitu karakteristik yang perlu dimiliki agar seseorang dapat melakukan pekerjaannya secara efektif. Biasanya pengetahuan dan ketrampilan dasar.
2. *Differentiating Competencies*, yaitu karakteristik yang membedakan antara karyawan yang superior dengan karyawan yang rata-rata.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif. Kesimpulan ini sesuai dengan yang dikatakan Armstrong (2003), bahwa kompetensi adalah :

*"Knowledge, skill dan kualitas individu untuk mencapai kesuksesan pekerjaannya"*.

Kompetensi sering digunakan sebagai kriteria utama untuk menentukan kerja karyawan seperti profesional, manajerial atau senior manajer. Kompetensi merupakan suatu kecakapan dan kemampuan individu dalam mengembangkan dan menggunakan potensi-potensi dirinya dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan organisasi atau tuntutan dari pekerjaan yang menggambarkan satu kinerja. Kompetensi dapat juga digunakan sebagai kriteria untuk menentukan penempatan kerja pegawai. Pegawai yang ditempatkan pada tugas tertentu akan mengetahui kompetensi apa yang diperlukan, serta jalan yang harus ditempuh untuk mencapainya dengan mengevaluasi kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan tolok ukur penilaian kinerja. Sehingga sistem pengelolaan sumber daya manusia lebih terarah, pegawai dapat dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, keahlian, motivasi dan kinerjanya..

Kompetensi dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar memungkinkan individu memperoleh berbagai kognisi atau pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Bagi masyarakat, belajar memainkan peranan penting, terutama dalam meneruskan kompetensi dan kebudayaan pada generasi penerus.

Lingkungan dapat menjadi sumber kompetensi yang sangat luas bagi individu selama individu tersebut mau memanfaatkan energi pikirannya terhadap hal-hal yang ditemui di lingkungan. Dengan demikian pada dasarnya kompetensi itu muncul dan berkembang melalui proses belajar (*learning process*) dan melibatkan tiga domain yaitu: domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Kompetensi itu sendiri termasuk dalam domain kognitif (Bloom, 2003: 18). Kognitif, menurut Nasser, dapat diartikan sebagai proses melalui mana informasi yang berasal dari indera manusia ditransformasikan, direduksi, dielaborasi, dikembangkan dan digunakan. Informasi dalam hal ini berarti masukan sensoris (*sensory input*) yang berasal dari lingkungan yang menginformasikan tentang hal-hal yang sedang terjadi pada Individu.

Bloom (2003: 18) mengemukakan bahwa kompetensi sebagai hasil belajar termasuk kedalam arah kognitif yang aspeknya terdiri dari:

- 1) Pengertian, dapat diartikan sebagai kegiatan mengingat:
  - a. Fakta-fakta dan istilah-istilah,
  - b. Cara atau alat yang digunakan untuk membuat spesifikasi, dan
  - c. Melakukan abstraksi melalui pembuatan prinsip-prinsip, generalisasi, teori, dan struktur.
- 2) Pemahaman, didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengerti lebih dalam mengenai materi yang telah dipelajari melalui kegiatan:
  - a. Menterjemahkan,
  - b. Menafsirkan,
  - c. Mengekstrapolasi informasi.
- 3) Penerapan, merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari dalam situasi tertentu.
- 4) Analisis, didefinisikan sebagai kemampuan merinci materi yang ada ke dalam bagian-bagian dan membedakan:
  - a. Elemen-elemennya,
  - b. Hubungan-hubungannya, dan
  - c. Prinsip-prinsip organisasinya.
- 5) Sintesis, didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggabungkan beberapa bagian menjadi satu kesatuan yang baru dalam bentuk:
  - a. Komunikasi yang unik,

- b. Rencana operasi, dan
- c. Seperangkat hubungan-hubungan yang abstrak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model kompetensi merupakan alat yang digunakan sebagai panduan oleh organisasi yang menggunakan pendekatan kompetensi dalam manajemen SDM-nya. Di mana, model kompetensi itu berisi deskripsi kompetensi-kompetensi yang diperlukan dalam tiap-tiap jabatan di dalam organisasi tersebut. Model kompetensi yang disusun dapat digunakan sebagai dasar dari perencanaan sumber daya manusia, di mana organisasi dapat mendefinisikan dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku-perilaku yang penting.

#### **4. Pengendalian internal**

Definisi pengendalian intern menurut COSO adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar dengan pencapaian tujuan dalam kategori yaitu : (a) efektifitas dan efisiensi operasi, (b) laporan keuangan, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Moeller, 2009:32).

Jogiyanto (2000:373) mendefinisikan sebagai berikut :

Pengendalian internal meliputi struktur suatu organisasi dan semua metode-metode yang terkoordinir serta ukuran-ukuran yang ditetapkan didalam suatu perusahaan untuk tujuan menjaga harta kekayaan milik perusahaan, memeriksa ketepatan dan kebenaran akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan, dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Dari pengertian pengendalian internal tersebut, terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut:

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang.
3. Pengendalian internal diharapkan hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.
4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tiga tujuan yang saling terkait, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian intern menurut Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah

daerah yang tercermin dari laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut : (a) pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektifitas operasi , (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **a. Unsur sistem pengendalian internal pemerintah**

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, melalui peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian internal dimaksud adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, penggunaan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang di adaptasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

##### 1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Peningkatan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Indikator lingkungan pengendalian ini memiliki makna bahwa pimpinan dan staf pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, melalui ; penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; dan kepemimpinan yang kondusif. Penegakan integritas dan nilai etika dilakukan dengan cara: menyusun dan menerapkan aturan perilaku; memberikan keteladanan; dan menegakkan tindakan disiplin.

## 2. Penilaian resiko

Penilaian resiko berdasarkan PP No 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah yaitu Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian resiko yang terdiri atas:

- a. Identifikasi resiko dan
- b. Analisis resiko

Indikator penilaian resiko ini memiliki makna bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, melalui identifikasi resiko dan analisis resiko. Penilaian resiko oleh pimpinan instansi pemerintah dengan cara menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan.



### 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan dan Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Indikator kegiatan pengendalian ini memiliki makna bahwa pimpinan beserta staf Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

#### 4. Informasi Dan Komunikasi

Kegiatan atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan

Pemantauan berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern dan pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Indikator pemantauan pengendalian intern ini memiliki makna bahwa Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

##### **b. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Berdasarkan buku modern auditing Boynton, Jhonson, dan Kell yang diterjemahkan oleh Budi (2003:375), keterbatasan yang melekat

(*inherent limitations*) adalah yang menjelaskan mengapa pengendalian internal, sebaik apapun ia dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian sesuatu entitas, yaitu : (a) kesalahan dalam pertimbangan ; (b) kemacetan ; (c) kolusi ; (d) penolakan manajemen ; (e) biaya versus manfaat.

Berdasarkan kutipan diatas dapat diketahui bahwa pengendalian internal tidak dapat menghilangkan semua masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Pengendalian internal memiliki keterbatasan yang mendasar, sehingga pengendalian internal hanya berfungsi untuk mengetahui masalah-masalah dengan cepat dan menekan serendah mungkin masalah dan kecurangan-kecurangan yang terjadi.

## **5. Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang seperti dikemukakan oleh Rohman (2009) adalah :

Keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar.

Menurut Mulyana (2006) pengertian dari aksesibilitas dalam laporan keuangan adalah :

Kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan.

Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Rohman, 2009).

Pengertian aksesibilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) adalah :

Hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Sementara Mulyono (2006:54) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Kadarmi (2008) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Menurut Mulyono (2006:57), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak disebabkan karena laporan keuangan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah

Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip

transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) (Kawedar, 2008).

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Informasi yang dimuat di dalam SIKD tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 102, UU No. 33 tahun 2004, mencakup:

1. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota;
2. Neraca daerah;
3. laporan arus kas;
4. Catatan atas laporan keuangan daerah;
5. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
6. Laporan keuangan badan usaha milik daerah;
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

#### **6. Peraturan – Peraturan Dalam Laporan Keuangan Daerah**

Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang tercantum di dalam penyusunan SKPD diantaranya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri dalam Negeri tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi daerah.

#### **7. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 Paragraf 9 sebagaimana terdapat diperaturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi –transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantumenentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Kartika Daniel danYohanes Suhardjo, 2013).

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:42) adalah:

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasiskadar ketidak sesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Menurut Masmudi (2003) definisi laporan keuangan adalah: Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya, laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Bastian (2003) dapat dikategorikan kualitas tertinggi, dapat dipahami dan berguna, kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji), kualitas sekunder; konsisten, komparatif, kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat.

Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Permana, 2012).

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga- lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak



yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2006). Ada empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu

entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi; 1999 dalam Zyen, 2009).

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah (Bastian, 2003).

## **8. Hubungan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Penggunaan laporan Keuangan Daerah**

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Wilson dan Kattelus 2002 dalam Rohman 2009).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perwujudan akuntabilitas publik belum tercapai sesuai harapan pengguna informasi. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mampu untuk menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka kepada publik. Faktor utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Bagaimana penilaian tanggung jawab itu selanjutnya kita kembalikan lagi kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan informasi-informasi terkait lainnya sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah yang kemudian dinilai oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan

melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan secara sukarela. Hasil feedback dari pengguna informasi atas penyajian laporan keuangan inilah yang kemudian menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah atas kinerja mereka selama tahun anggaran berlangsung.

### **9. Hubungan Sumber Daya Manusia Terhadap Penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia subbagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010). Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban

anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **10. Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penggunaan Laporan Keuangan Daerah**

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan

keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders.

Sistem pengendalian internal meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi operasi pemerintah . Dengan demikian, pengendalian intern merupakan pondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait. (Badan Pemeriksa Keuangan).

Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti, 2010. Nugraha dan Susanti (2010) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengendalian intern akuntansi dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **11. Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Laporan Keuangan Daerah**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley et al, 1990, dalam Rohman, 2009).

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak hanya disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibilitas pada pengguna potensial (Jones et al., 1985 dalam Mulyana 2006). Oleh karena itu, pemerintah daerah mendapat motivasi agar mampu menyajikan laporan keuangan tidak hanya kepada DPRD tetapi juga harus menyajikan fasilitas kepada masyarakat berupa kemudahan dalam mengetahui atau memperoleh informasi laporan keuangan.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap akhir tahun periode anggaran Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyajikan Laporan Keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Keuangan serta ikhtisar Laporan Keuangan BUMD. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Diduga Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah.

## **12. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama peneliliti, tahun penelitian, variabel yang dipergunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat pada table berikut ini.



**Tabel II. 1**  
**Penelitian terdahulu**

No.	Nama penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang Di Gunakan	Hasil Penelitian
1	Ratna Amalia Safitri (2009)	penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (studi empiris di Kabupaten Semarang)	<b>Variable independen:</b> penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah <b>Variable dependen:</b> penggunaan informasi keuangan daerah	1. Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
2.	Himmah Bandary (2011)	pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah ( studi pada kabupaten Eks Karasidenan Banyumas)	<b>Variable independen:</b> penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah <b>Variable dependen:</b> penggunaan informasi keuangan daerah	1. penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. 2. aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

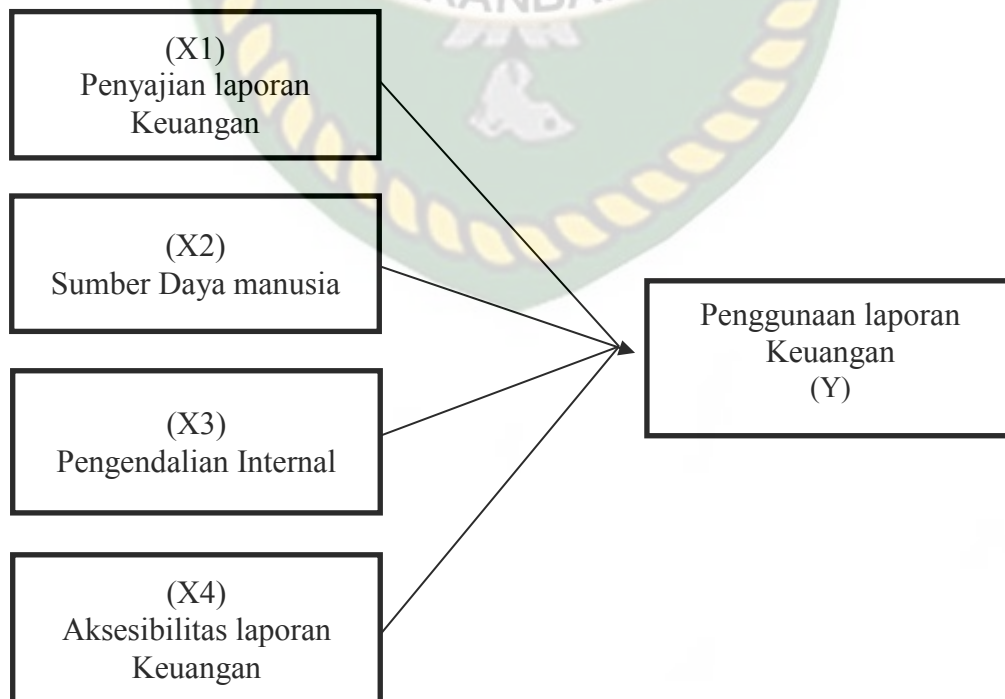
3	Desi Indriasari (2012)	tentang pengaruh kapasitas sumberdaya manusia ,pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah studi empiris pada kota Palembang dan kabupaten ogan ilir	<b>Variable independen:</b> kapasitas sumberdaya manusia ,pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi <b>Variable dependen:</b> nilai informasi pelaporan keuangan daerah	1. kapasitas sumber daya tidak berpengaruh, 2. pengendalian intern berpengaruh
4	Sanjaya, dkk (2014)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap penggunaan laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng	<b>Variable independen:</b> Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Dan Aksesibilitas <b>Variable dependen:</b> penggunaan laporan keuangan daerah	penyajian laporan keuangan daerah, sumber daya manusia, pengendalian internal dan aksesibilitas berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan daerah.
5	Desi Ratna Sari (2015)	pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, sumber daya manusia (SDM), pengendalian internal dan aksesibilitas terhadap penggunaan laporan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.	<b>Variable independen:</b> pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, sumber daya manusia (SDM), pengendalian internal dan aksesibilitas <b>Variable dependen:</b> penggunaan laporan keuangan daerah	1. penyajian laporan keuangan, pengendalian internal dan aksesibilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan laporan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 2. kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan laporan keuangan daerah Kabupaten Inhu.

6.	Rusiana (2015)	penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Kampar	<p><b>Variable independen:</b> penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah</p> <p><b>Variable dependen:</b> penggunaan informasi keuangan daerah</p>	<p>1. penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.</p> <p>2. aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.</p>
----	----------------	---	--	--

### 13. Model Penelitian

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

**Gambar II.I**  
**Model Penelitian**



## B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian masalah dan kajian pustaka diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

- H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan penggunaan laporan keuangan daerah
- H2 : Sumber daya manusia berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan daerah
- H3 : Pengendalian internal berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan daerah
- H4 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Penggunaan Laporan Keuangan Daerah
- H5 : Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas berpengaruh terhadap Penggunaan Laporan Keuangan Daerah.